

BUDAYA PATRIARKHI DAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Israpil *

Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar

Abstract

Culturally, Indonesian society is indeed very thick with patriarchal customs. Patriarchy is a concept used in the social sciences, especially in Anthropology. The concept of patriarchy and violence against women is the main discussion in this paper. Patriarchal culture has for generations shaped differences in behavior, status and authority between men and women, the distribution of male power has advantages over women in one or more aspects, such as the determination of lineage (exclusive patrilineal descent and carrying a last name), rights of firstborn children, personal autonomy in social relations, and participation in public and political status. Men monopolize all roles. The unequal relationship often creates conflicts within the community, especially conflicts within the household that lead to acts of violence against women.

Keywords: Patriarchy, Violence, Women

A. PENDAHULUAN

Konsepsi persepsi patriarkhi pada prinsipnya didasari oleh pandangan paternalis yang memberikan asumsi bahwa dalam sistem sosial, keberadaan bapak atau laki-laki menjadi suatu fenomena yang menentukan terwujudnya struktur fungsionalisme dalam keluarga. Konsep paternalis merupakan signifikansi simbol bahwa laki-

*) Email: apillitbang@yahoo.com

Jurnal ini tersedia di: http://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/jurnal_pusaka/article/view/177

laki adalah simbol sistem kepemimpinan yang berdasarkan hubungan antara ibu dan anak-anaknya dalam membentuk sebuah dinamika kehidupan sosial yang utuh.¹

Penerapan persepsi patriarkhi dalam esensinya pada sistem sosial dan tatanan sosial menempatkan peran dari aktor-aktor sosial sangat diperhatikan. Sastryani menyatakan bahwa persepsi patriarkhi merupakan sistem dari pengelompokan sosial yang sangat mementingkan garis turunan bapak atau dengan kata lain esensi laki-laki menjadi pertimbangan utama untuk ditempatkan sebagai obyek pelaku dari sistem sosial.²

Kehidupan keseharian sering mewarnai implementasi sistem sosial yang menjadikan patriarkhi sebagai sebuah prasyarat di dalam menciptakan tatanan sistem sosial yang terkonstruksikan. Berry menyatakan masyarakat yang menganut sistem sosial selalu menjadikan patriarkhi sebagai tolok ukur dalam melihat hubungan-hubungan yang terjalin dalam struktur dan fungsi sosial. Semua yang melekat dalam diri individu masyarakat selalu mengedepankan nilai patriarkhi seperti selalu mengutamakan kondisi hukum berdasarkan garis bapak, memakai nama bapak, warisan harta bapak dan ketua adat atau bentuk-bentuk yang mendominasi eksistensi bapak.³

Implementasi dari patriarkhi dalam sistem sosial sangat berperan penting menjadikan laki-laki atau bapak sebagai pendamping bagi perempuan. Pandangan ini yang melahirkan adanya persepsi gender bahwa laki-laki dan perempuan memiliki sifat yang berbeda, sehingga laki-laki memiliki dominasi untuk mendapatkan penghargaan, penghormatan dan menjaga kewibaannya. Perempuan harus mampu melakukan pembagian tugas yang bersifat urusan rumah tangga dan senantiasa menjaga pengungkapan kasih sayang dalam menjaga kondisi emosional dan psikis dari laki-laki untuk selalu eksis dengan kemampuan patriarkhinya.

Prinsipnya, persepsi patriarkhi di kalangan masyarakat yang menganut sistem sosial selalu menjadikan laki-laki sebagai hal yang berperan penting di dalam mengangkat harkat perempuan. Nilai patriarkhi tersebut esensi dengan kuadrat bahwa perempuan ditakdirkan untuk mendampingi laki-laki dalam menjaga eksis-

¹ W.J. Goode, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 18

² Sastryani, *Glosarium, Seks, dan Gender*. (Yogyakarta: Caraswati Books, 2007), hlm. 65

³ Berry, *Psikologi at Work*. (England: Oxford, 1992), hlm. 124

tensi, ketokohan, penghargaan, kewibawaan, pelaksanaan tugasnya, dan pengungkapan kasih sayang dalam rangka menciptakan tatanan sosial yang lebih harmonis dan berimbang.⁴

Berdasarkan prinsip tersebut secara Sosiologi dipandang bahwa persepsi patriarkhi pada prinsipnya memiliki keterkaitan dengan eksistensi gender. Mulia mengatakan bahwa perempuan dan laki-laki adalah setara, dalam melakukan upaya-upaya transformasi dan humanisasi, dimulai dari diri sendiri, keluarga dan masyarakat demi terwujudnya masyarakat yang berkeadaban.⁵

Perempuan dapat menekuni aktivitasnya di ruang publik dengan baik, kerja domestik di rumah tangga, hendaknya dibagi secara sukarela bersama laki-laki. Ayah dan ibu membuat kesepakatan bersama tentang pengelolaan tugas-tugas di rumah tangga; anak-anak laki-laki dan perempuan mendapatkan tugas yang proporsional sehingga beban di rumah tangga dapat dipikul bersama. Dengan begitu, mitos segregasi kerja yang selama ini dianut di masyarakat, yaitu bahwa tugas perempuan semata-mata mengurus rumah tangga dan laki-laki hanya mencari nafkah di luar rumah, dapat dieliminasi secara bertahap.⁶

Keseimbangan proporsi tersebut dilihat bahwa kodrat perempuan merupakan pengabdian kepada laki-laki. Ini berarti, kaum perempuan dan laki-laki tidak dapat disamakan dalam pengembangan sifat dan karakter, yang dapat dipersamakan hanya bertalian secara struktural dan fungsional dalam sistem sosial suatu masyarakat.

Memahami secara gender, laki-laki ditakdirkan telah memiliki sifat dominan yang kuat, keras, butuh penghargaan, penghormatan dan kewibawaan, berani, lugas dan memiliki komitmen yang tinggi. Perempuan memiliki sifat dominan lemah, senang dipuji, mempersolek diri, telaten, senang dengan keindahan, suka menyayangi dan mencintai.

⁴ Spradley, *Gender & Pembangunan* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), hlm. 34

⁵ Musda Mulia, *Indahnya Islam: Menyuarakan Kesetaraan & Keadilan Gender*, (Yogyakarta: Nauvan Pustaka, 2014), hlm. 43

⁶ *Ibid*, hlm. 47

B. PENGERTIAN PATRIARKHI

Patriarkhi adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai sosok otoritas utama yang sentral dalam organisasi sosial. Posisi laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan dalam segala aspek kehidupan sosial, budaya dan ekonomi.⁷

Ayah memiliki otoritas terhadap ibu, anak-anak dan harta benda. Secara tersirat sistem ini melembagakan pemerintahan dan hak istimewa laki-laki dan menuntut subordinasi perempuan. Bahkan dinilai sebagai penyebab dari penindasan terhadap perempuan.⁸

Patriarkhi adalah konsep yang digunakan dalam ilmu-ilmu sosial, terutama dalam Antropologi dan studi referensi feminitas ke distribusi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Dalam struktur patriarkhis, laki-laki memiliki keunggulan dalam satu atau lebih aspek, seperti penentuan garis keturunan (keturunan patrilineal eksklusif dan membawa nama belakang), hak-hak anak sulung, otonomi pribadi dalam hubungan sosial, partisipasi dalam status publik dan politik atau agama atau atribusi dari berbagai pekerjaan pria dan wanita ditentukan oleh pembagian kerja secara seksual.

Pengertian lainnya mengemukakan patriarkhi adalah sistem sosial hubungan gender yang di dalamnya terdapat ketidaksetaraan gender. Laki-laki bermonopoli akan seluruh peran.⁹ Relasi gender adalah relasi sosial antara laki-laki dengan perempuan dan melekat dalam beragam institusi sosial dan struktur sosial. Konsep patriarkhi menggabungkan konsep hubungan-hubungan gender, dan kemudian berkembang menjadi dua pandangan. *Pertama*, meliputi ketidakadilan yang sering terjadi dalam relasi gender. *Kedua*, menarik perhatian kepada keterhubungan antara beberapa aspek hubungan-hubungan gender yang berbeda yang kemudian membentuk sistem sosial.

⁷ Saroha Pinem, *Kesehatan Reproduksi dan Kontrasepsi*. (Jakarta: Trans Media, 2009), hlm. 42

⁸ Alice Susantro Walkins, dkk. *Feminisme Untuk Pemula*. (Yogyakarta: Resist Book, 2007), hlm. 120

⁹ Ria Manurung, *Kekerasan Terhadap Perempuan pada Masyarakat Multi Etnik*. (Yogyakarta: Pusat Studi Kependidikan dan Kebijakan UGM Ford Foundation, 2002), hlm. 131

Dalam berbagai aspek kehidupan sosial terdapat ketidakadilan gender, di mana perempuan sering tidak diuntungkan jika dibanding dengan laki-laki. Contohnya, dalam pekerjaan, terdapat kesenjangan gender dalam upah, di mana perempuan rata-rata di bayar lebih rendah dari laki-laki. Perempuan mengerjakan pekerjaan domestik yang tidak proporsional, seperti pekerjaan rumah tangga dan mengurus anak. Perempuan lebih terlihat miskin dari pada laki-laki, terutama dalam usia tua. Laki-laki mengambil porsi yang berlebih dalam kekuasaan politik, misalnya menjadi anggota parlemen. Perempuan memiliki pengalaman kekerasan dari laki-laki, seperti kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual. Laki-laki terlihat memiliki pengaruh untuk membentuk kultur dan standar moral, misalnya sebagai editor koran dan pemuka agama. Tentu saja ada perkecualian individual dari kalimat-kalimat tersebut, jika yang dimaksudkan adalah rata-rata peristiwa ketidakadilan gender, bukan apa yang dialami setiap laki-laki atau perempuan. Pola ketidakadilan gender tersebut berulang terus-menerus di dalam struktur sosial.

Terdapat beragam definisi patriarkhi. Beberapa definisi awal cenderung memfokuskan diri kepada peran laki-laki dewasa sebagai kepala rumah tangga (lihat *kinship, family and marriage*), meliputi fokus kepada generasi dan satu lembaga sosial yang spesifik. Definisi yang paling akhir saat ini tampak lebih leluasa, di mana lembaga-lembaga sosial dipandang berkontribusi dalam membentuk patriarkhi, dan keluarga menjadi salah satunya.

Konsep patriarkhi mengungkap adanya keterhubungan beragam aspek yang berbeda dalam ketidakadilan gender. Ada sebab yang saling berkaitan antara ketidakadilan gender dalam representasi politik dihubungkan dengan ketidakadilan dalam tempat kerja. Ketika ketidakadilan gender dalam kekuasaan politik menurun, jika perempuan meningkatkan representasinya di parlemen dan kabinet, muncul kecenderungan meningkatnya jumlah peraturan yang mendukung perempuan dalam pekerjaan, yang oleh karenanya mampu mempersempit jurang pemberian upah secara gender. Aspek yang lain, dimensi atau ranah patriarkhi dihubungkan. Keterhubungan ini berarti menjadi bukti adanya sistem ketidakadilan gender, bukan semata sekumpulan keterpisahan dan peristiwa-peristiwa yang tidak berkait satu dengan yang lain.

Pernyataan yang menunjuk adanya sistem sosial di dalam konsep patriarkhi menjadi penting bagi analisis Sosiologis mengenai ketidakadilan gender yang kemudian dapat melahirkan penjelasan yang lebih mendalam dan kuat terhadap aspek-aspek

yang beragam dalam hubungan gender. Hal itu memungkinkan untuk membangun hubungan antara tingkat analisis yang beragam, struktur sosial dengan fenomena pada tingkat individual. Contohnya, perempuan membuat keputusan, namun tidak pada situasi saat pengambilan keputusan itu dilakukan: perempuan “memilih” pekerjaan paruh waktu dengan bayaran yang rendah karena hanya itulah pekerjaan yang cocok dengan waktu sekolah anak yang membuat pengasuhan anak semakin tidak berkualitas. Penjelasan mengenai “pilihan” perempuan tersebut akan semakin menguat jika dimasukkan unsur institusi sosial dan struktur sosial dalam analisis.

Beragam bentuk patriarkhi waktu dan tempat berbeda. Salah satu dimensi ragam tersebut mencakup patriarkhi domestic. Pada umumnya, perempuan cenderung tersisih dari pekerjaan-pekerjaan dengan upah tinggi karena jenis pekerjaan yang dapat diambil perempuan sudah ditentukan oleh laki-laki.¹⁰ Dimensi ini bervariasi bergantung seberapa jauh perempuan dikendalikan dalam ruang domestik dan sejauh mana pula perempuan hadir dalam lembaga-lembaga publik, seperti pekerjaan, universitas dan parlemen. Dimensi kedua adalah tingkat ketidakadilan gender, contohnya seberapa besar jurang pemberian upah secara gender. Modernitas menjadi saksi bagi kecendrungan adanya transformasi bentuk patriarkhi dari bentuk domestik ke publik. Transformasi ini hanya sebagian berhubungan dengan perubahan dalam tingkat ketidakadilan, yang karenanya, dibutuhkan analisis yang terpisah terhadap dimensi tersebut. Arah modernisasi patriarkhi tidaklah seragam atau universal, melainkan sangat bergantung kepada arah modernisasi itu sendiri di mana perubahan-perubahan awal dan sejumlah hubungan-hubungan sosial yang lain memengaruhi arah perubahan tersebut.

Konsep patriarkhi terkadang mengundang kontroversi. Hal itu sering terjadi karena munculnya kesalahpahaman. Terutama, konsep patriarkhi sering diasumsikan bahwa analisis yang menggunakan konsep patriarkhi mestilah universalis dan esensial, menurunkan perbedaan sosial antara laki-laki dengan perempuan pada sisi perbedaan biologis semata, dan mengabaikan perbedaan pola hubungan gender pada waktu dan tempat yang berbeda. Misalnya saja konsep kebebasan dan kemandirian bagi perempuan yang diproklamkan oleh Islam sering disalahpahami. Kebebasan itu seringkali diidentikkan dengan kebebasan bergaul dengan lawan jenis

¹ Kamla Bhasin, *Menggugat Patriarkhi, Pengantar Tentang Persoalan Dominasi Terhadap Kaum Perempuan (Terjemahan)*. (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1996), hlm. 6

dan eksploitasi tubuh untuk kepentingan seksual. Akibatnya banyak muncul di permukaan adalah perempuan-perempuan yang mempertontonkan keindahan tubuhnya untuk kepentingan komersial dan menjadi objek kapitalisme.¹¹

Sebagai konsekuensinya, terdapat perkembangan istilah dalam patriarkhi untuk menangkap konsep sistem sosial ketidaksetaraan gender. Hal itu termasuk, misalnya, istilah “rezim gender”. Penggunaan istilah gender yang lebih dari penggunaan istilah patriarkhi telah menghapus keraguan mengenai karakter sosial dari sistem sosial, lebih dari sekedar dasar biologis sistem sosial itu sendiri. Selanjutnya, istilah “rezim” lebih halus konotasinya daripada sistem, yang menandai pentingnya interaksi sejumlah hubungan-hubungan sosial lainnya seperti, kelas dan etnisitas, dalam membentuk hubungan-hubungan gender. Dalam praktiknya, kedua istilah tersebut saling bertukar secara efektif, memaknai hal yang sama, yaitu sistem sosial ketiakesetaraan hubungan-hubungan gender.

Penambahan konsep patriarkhi ke dalam perbendaharaan kata Sosiologi memfasilitasi analisis hubungan-hubungan gender pada tingkat struktur dan sistem sosial, berkembang melebihi konsepsi gender yang ditentukan oleh biologi atau psikologi.

C. BUDAYA PATRIARKHI

Budaya patriarkhi merupakan budaya dimana lelaki mempunyai kedudukan lebih tinggi dari wanita. Dalam budaya ini, ada perbedaan yang jelas mengenai tugas dan peranan wanita dan lelaki dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam keluarga. Budaya patriarkhi secara turun temurun membentuk perbedaan perilaku, status dan otoritas antara laki-laki dan perempuan di masyarakat yang kemudian menjadi hirarki gender.

Laki-laki sebagai pemimpin atau kepala keluarga memiliki otoritas yang meliputi kontrol terhadap sumber daya ekonomi, dan suatu pembagian kerja secara seksual dalam keluarga. Hal ini menyebabkan wanita memiliki akses yang lebih sedikit di sektor publik dibandingkan lelaki. Patriarkhi adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan sistem sosial di mana kaum laki-laki sebagai suatu kelompok mengendalikan kekuasaan atas kaum perempuan.

¹ Musda Mulia, *Indahnya Islam...*, hlm. 45

Islam bukan agama patriarkhi. Semua manusia adalah setara dan berasal dari sumber yang satu yaitu Allah swt, yang membedakan di antara manusia hanyalah prestasi dan kualitas takwa. Sebagaimana yang tercantum dalam Alquran surat al-Dzariyat 51: 56 yang artinya: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.¹²

Islam tidak mengajarkan bahwa kedudukan wanita berada di bawah seorang pria. Islam mengajarkan bahwa seorang wanita ketika menikah maka tanggung jawab atas dirinya berada di diri laki-laki yang menjadi suaminya. Islam memberikan penghormatan yang besar terhadap wanita, karena sebaik-baiknya pria muslim adalah yang berbuat baik kepada istrinya. Islam memberikan kehormatan yang tinggi bagi para muslimah. Tidak ada kewajiban bagi mereka untuk mencari nafkah. Bukannya menggambarkan wanita sebagai orang yang lemah dan tukang membebani laki-laki, tapi ini adalah penghormatan Islam kepada wanita sehubungan dengan tugas mereka yang amat vital di dalam rumah keluarganya.

Islam memberikan kewajiban dan hak yang sama bagi pria maupun wanita, namun pria diberikan satu tingkat lebih tinggi dibanding wanita bukan untuk merendahkan tapi dalam sebuah rumah tangga pria menjadi imam yang memiliki tanggung jawab serta tugas yang tidak mudah dalam menjaga istri dan anak-anaknya kelak.

D. BUDAYA PATRIARKHI PICU KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Kriminalitas seakan tak mau henggang di negeri ini. Bagaimana tidak, persoalan ekonomi, sosial maupun budaya di masyarakat telah mendorong adanya kejahatan, baik itu kejahatan pencurian, penganiayaan, tindak asusila, pemerkosaan hingga kasus pembunuhan. Dari tindak kriminal yang ada, tak sedikit perempuan menjadi korban kekerasan atas aksi kejahatan, khususnya pemerkosaan dan tindak asusila. Budaya patriarkhi terus membelenggu, mengakibatkan laki-laki memandang rendah wanita dan berbuat semena-mena.

Misalnya saja kasus Priya Puspita Restanti (16) pada tahun 2013 silam, salah satu siswi SMK di Sleman yang telah menyita perhatian publik. Aksi kebiadaban yang dilakukan oleh ayah dan anak, juga keterlibatan oknum aparat kepolisian mencederai moral bangsa. Tindakan pemerkosaan dan pembunuhan dilakukan hanya untuk

¹ Ibid, hlm. 32

mencari kesenangan sesaat, dinilai melecehkan harkat dan martabat wanita. Belum luput dari itu, lagi, kasus serupa (asusila) dilakukan oleh seorang nelayan menyebuhi anak tirinya dari umur 12 tahun. Rentannya posisi wanita sebagai dalang citra buruk, menjadi corong menguatnya aksi kriminalitas.

Wanita sering menjadi ancaman dan sasaran dalam dunia kriminal. Terlebih dengan tabiat hawa nafsu laki-laki yang lebih besar dibanding perempuan, memicu untuk berbuat keji. Kemolekan wanita telah meracuni pikiran dan niat yang buruk. Inilah bentuk keroposnya akhlak. Ada kalanya keimanan seseorang turun dan naik. Inilah yang harusnya menjadi tantangan laki-laki untuk mengendalikan syahwat, tentunya juga didukung oleh lingkungan wanita yang memiliki akhlak yang baik pula, tidak mengumbar keindahan tubuh.

Refleksi akan lahirnya Hari Kartini belum mampu menjadi cahaya dalam memperjuangkan emansipasi wanita. Hari Kartini hanya dianggap isapan formalitas semata, bukan menjadi wajah refleksi untuk memperjuangkan hak yang sama. Terbukti dengan masih bergulirnya tindakan yang menyudutkan perempuan, yakni perlakuan buruk terhadapnya. Hal ini sudah membudaya di masyarakat yang harus dituntaskan, mengingat setiap manusia memiliki hak yang sama serta wajib menghormati atas kepribadian. Dalam Islam pun, perempuan dimuliakan. Tidak ada sekat di antara laki-laki, terkecuali jika mereka melakukan perbuatan keji. Hal ini mengindikasikan bahwa pola dan budaya masyarakat yang patut dibenahi, bukan karena perempuannya.

Budaya patriarkhi semacam ini, haruslah menjadi cerminan untuk terus memperjuangkan hak perempuan. Menghilangkan sebuah budaya tidaklah mudah, akan tetapi untuk menguranginya masih bisa menjadi harapan. Mensubstitusikan budaya yang lebih baik, mencitrakan perempuan sebagai sosok yang mulia, serta memperbaiki akhlak pribadi manusia bisa menjadi langkah kecil yang nyata untuk menumpas paradigma patriarkhi. Bila hal ini dilakukan, maka tingkat kriminalitas dengan korban perempuan akan ikut menurun juga.

E. DAMPAK PATRIARKHI TERHADAP KONFLIK YANG TERJADI DI INDONESIA

Menurut Bhasin menjelaskan bahwa kata patriarkhi secara harafiah berarti kekuasaan bapak atau “patriakh (*patriarch*)”. Pada awalnya patriarkhi digunakan untuk menyebut suatu jenis “keluarga yang dikuasai oleh kaum laki-laki”, yaitu rumah tangga besar *patriarch* yang dikuasai oleh laki-laki.¹³ Secara detail, patriarkhi merujuk pada sebuah bentuk organisasi rumah tangga dimana laki-laki mendominasi anggota keluarga yang lain dan mengontrol produksi ekonomi rumah tangga. Patriarkhi dipandang sebagai ideologi bagaimana laki-laki mendominasi. Masyarakat yang patriarkhis adalah masyarakat yang dimana laki-laki memiliki kekuatan dan kontrol. Perempuan biasanya dieksploitasi, dirugikan dan mempunyai status yang lebih rendah.

Kultur patriarkhi mempengaruhi pola pikir masyarakat. Perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan terutama terhadap kaum perempuan. Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam pelbagai bentuk ketidakadilan yaitu marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotipe atau melalui pelabelan negatif, kekerasan, beban kerja yang panjang dan lebih banyak serta sosialisasi ideologi peran gender.¹⁴ Sementara itu peran-peran sub ordinasi paling umum diperankan oleh perempuan dalam hubungan kekuasaan: perempuan berperan sebagai korektor (*fixer*), ia ingin hubungan itu stabil, harmonis dan menyenangkan; perempuan sebagai penyenang (*pleaser*), ia mencoba memenuhi harapan laki-laki; perempuan sebagai suhuda (*martyr*): ia ingin pasangannya hidup senang sekalipun mengorbankan dirinya. Ketidakadilan gender yang ada dalam suatu rumah tangga akan menghasilkan konflik diantara suami istri yang jika dibiarkan terus berlanjut akan mengakibatkan perceraian. Hubungan perkawinan antar suami dan istri merupakan ikatan sentral persatuan keluarga di dalam masyarakat, apabila ikatan ini pecah, keluarga juga akan pecah.¹⁵

5

¹ Kamla Bhasin, *Menggugat Patriarkhi...*, hlm. 1

¹ Mansur Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1999), hlm. 12-13

¹ Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), hlm. 167

Dalam kehidupan rumah tangga, laki-laki ditempatkan secara budaya sebagai kepala rumah tangga sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga dimana posisinya selalu berada di bawah dominasi laki-laki. Perempuan dipandang lebih utama untuk berkiprah di sektor domestik, membersihkan rumah, memasak, mencuci, dan mengasuh anak. Jika ia bekerja di sektor publik, disamping harus memilih pekerjaan yang sesuai dengan kodratnya, dia tetap sebagai pembantu suami dalam memenuhi kebutuhan nafkah keluarga.

Konflik di dalam masyarakat Indonesia dapat diawali dari konflik rumah tangga, hal ini terjadi karena rumah tangga merupakan komunitas terkecil yang memiliki pemahaman patriarkhi. Secara keseluruhan (kecuali Minangkabau), masyarakat Indonesia menganut patriarkhi sehingga pemikiran laki-laki lebih dominan dalam masyarakat pun semakin kuat.

Selain itu, sebagian besar konflik yang terjadi dikarenakan maskulinitas kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Hanya sedikit yang mempertimbangkan ke-femininitasan. Masyarakat Indonesia secara kultural memang sangat kental dengan adat patriarkhi. Hampir semua konflik yang terjadi karena adanya kebijakan penyelesaian dengan kekerasan. Bahkan, ketika Presiden Indonesia perempuan yakni Megawati Soekarnoputri pun menggunakan kebijakan Daerah Operasi Militer (DOM) bagi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang menggunakan kekuatan militer yang sangat membuat traumatis bagi masyarakat Aceh.

F. KESIMPULAN

Budaya patriarkhi adalah struktur social yang menempatkan laki-laki menjadi kepala keluarga sekaligus pencari nafkah untuk keluarganya, dan di lingkungan keluarga isteri hanya sebatas bekerja di domestik di rumah tangga saja, walaupun sekarang perempuan mulai memperjuangkan hak-haknya sebagai wanita. Hal ini sejalan dengan agama Islam, bahwa perempuan itu sangat di muliakan tanpa ada sekat di antara mereka. Sayangnya, nilai-nilai Islam yang begitu ideal dan luhur, ketika turun ke bumi dan berinteraksi dalam kehidupan umat manusia, disengaja atau tidak, di sana sini telah terjadi distorsi.

Realitas sosial berkata lain, adanya budaya patriarkhi ini membuat banyaknya tindak kekerasan terhadap perempuan. Perempuan sering menjadi ancaman dan sasaran

dalam dunia kriminal. Terlebih dengan tabiat hawa nafsu laki-laki yang lebih besar dibanding perempuan, memicu untuk berbuat keji. Kemolekan wanita telah meracuni pikiran dan niat yang buruk. Inilah bentuk keroposnya akhlak, celah-celah keimanan goyah dan menjadi peluang untuk mengajak ke perbuatan tercelah. Memang, ada kalanya keimanan seseorang turun dan naik. Inilah yang harusnya menjadi tantangan laki-laki untuk mengendalikan syahwat, tentunya juga didukung oleh lingkungan wanita yang memiliki akhlak yang baik pula, tidak mengumbar keindahan tubuh. []

DAFTAR PUSTAKA

- Berry. 1992. *Psikology at Work*. England: Oxford.
- Bhasin, Kamla. 1996. *Menggugat Patriarkhi, Pengantar Tentang Persoalan Dominasi Terhadap Kaum Perempuan (Terjemahan)*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- Fakih, Mansur. 1999. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Goode, W.J. 2007. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ihromi. 1999. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Manurung, Ria. 2002. *Kekerasan Terhadap Perempuan pada Masyarakat Multi Etnik*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependidikan dan Kebijakan UGM Ford Foundation.
- Mulia, Musda. 2014. *Indahnya Islam: Menyuarakan Kesetaraan & Keadilan Gender*. Yogyakarta: Nauvan Pustaka.
- _____. 2014. *Kemuliaan Perempuan dalam Islam*. Jakarta: Megawati Institute.
- Mustadjar, Musdalia. 2012. *Gender Dalam Keluarga Bugis Di kota Makassar: Studi kasus 5 (lima) suami isteri*. Desertasi: Pasca Sarjana UNM Makassar.
- Pinem, Saroha. 2009. *Kesehatan Reproduksi dan Kontrasepsi*. Jakarta: Trans Media.
- Sastryani. 2007. *Glosarium, Seks, dan Gender*. Yogyakarta: Carasuati Books.
- Spradley. 2007. *Gender & Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Walkins, Alice Susantro (dkk). 2007. *Feminisme Untuk Pemula*. Yogyakarta: Resist Book.
- www.jurnalperempuan.org. diakses pada tanggal 28 Agustus 2017.